

Ultra Komunika dalam Stand Up Comedy di Era *Cyber Democracy*

¹⁾ Faisal

¹ Universitas Pamulang

dosen03103@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *ultra komunika* dalam praktik stand up comedy di era *cyber democracy*, dengan menekankan pada peran humor politik sebagai medium komunikasi yang kompleks, multidimensional, dan sarat makna ideologis. Dalam konteks komunikasi digital yang ditandai oleh interaktivitas, konektivitas, dan partisipasi audiens, stand up comedy tidak lagi sekadar hiburan, melainkan menjadi ruang produksi, reproduksi, dan distribusi wacana politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis untuk mengkaji bagaimana humor diproduksi, dimaknai, serta disebarluaskan dalam ekosistem media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ultra komunika* dalam stand up comedy terbentuk melalui interaksi antara komika, audiens, dan platform digital. Humor politik berfungsi sebagai alat hegemoni sekaligus resistensi, tergantung pada posisi ideologis komika dan relasinya dengan kekuasaan. Selain itu, budaya partisipatif memungkinkan audiens berperan sebagai *co-creator* yang turut membentuk makna melalui praktik seperti *sharing*, *remixing*, dan *commentary*. Namun, dinamika ini juga memunculkan fenomena hiperrealitas, di mana konten humor yang viral dapat membentuk persepsi publik yang tidak selalu berbasis pada realitas objektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa algoritma media sosial berperan penting dalam memperkuat viralitas dan memperluas jangkauan pesan humor politik, sekaligus berkontribusi terhadap fragmentasi opini dan terbentuknya *echo chamber*. Dengan demikian, *ultra komunika* dalam stand up comedy mencerminkan arena pertarungan wacana yang melibatkan dimensi ideologi, kekuasaan, dan teknologi secara simultan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa humor politik dalam era digital memiliki kekuatan signifikan dalam membentuk kesadaran publik, namun juga memerlukan literasi kritis agar tidak terjebak dalam simplifikasi dan distorsi makna.

Kata Kunci: *ultra komunika*, stand up comedy, cyber democracy, komunikasi politik, humor politik, pemilu 2024

Abstrak

This study aims to analyze the phenomenon of ultra communication in the practice of stand-up comedy in the era of cyber democracy, emphasizing the role of political humor as a complex, multidimensional communication medium rich in ideological meaning. In the context of digital communication characterized by interactivity, connectivity, and audience participation, stand-up comedy is no longer merely entertainment, but has become a space for the production, reproduction, and distribution of political discourse. This research employs a qualitative approach using critical discourse analysis to examine how humor is produced, interpreted, and disseminated within the digital media ecosystem. The findings indicate that ultra communication in stand-up comedy is formed through interactions among comedians, audiences, and digital platforms. Political humor functions both as a tool of hegemony and as a form of resistance, depending on the comedian's ideological position and their relationship with power. Furthermore, participatory culture enables audiences to act as co-creators who actively shape meaning through practices such as sharing, remixing, and commentary. However, this dynamic also gives rise to the phenomenon of hyperreality, in which viral humorous content can shape public perception that is not always grounded in objective reality. The study also finds that social media algorithms play a crucial role in amplifying virality and expanding the reach of political humor messages, while simultaneously contributing to opinion fragmentation and the formation of echo chambers. Thus, ultra communication in stand-up comedy reflects an arena of discursive struggle involving ideology, power, and technology simultaneously. This study concludes that political humor in the digital era holds significant power in shaping public awareness, yet it also requires critical literacy

Submitted: May 2026, **Accepted:** July 2026, **Published:** August 2026

to avoid simplification and distortion of meaning.

Keywords: *ultra communication, stand-up comedy, cyber democracy, political communication, political humor, 2024 election*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam praktik komunikasi politik di masyarakat kontemporer. Internet dan media sosial menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan distribusi informasi berlangsung secara horizontal dan partisipatif. Dalam konteks ini, konsep *cyber democracy* sebagaimana dijelaskan oleh Peter Dahlgren menekankan bahwa demokrasi modern tidak lagi bergantung pada institusi formal, melainkan pada interaksi digital warga (Dahlgren, 2009). Transformasi ini mengubah relasi antara produsen dan konsumen informasi politik menjadi lebih cair. Akibatnya, setiap individu berpotensi menjadi aktor komunikasi politik yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik.

Perubahan tersebut juga berdampak pada munculnya aktor-aktor baru dalam komunikasi politik digital. Salah satu aktor yang menarik untuk dikaji adalah komika atau pelaku stand up comedy. Dalam era digital, komika tidak lagi hanya tampil di panggung hiburan, tetapi juga aktif di berbagai platform seperti YouTube, Instagram, dan podcast. Hal ini memungkinkan pesan humor yang mereka sampaikan tersebar secara luas dan cepat. Dengan demikian, komika menjadi bagian dari ekosistem komunikasi politik yang semakin kompleks.

No	Komika	Indikasi Keberpihakan	Bentuk Ekspresi	Link Berita / Sumber	Catatan Analisis
1	Kiky Saputri	Cenderung Prabowo–Gibran	Kedekatan dengan elite, konten politik	https://www.suara.com/lifestyle/2024/07/21/104824/gurita-bisnis-kiky-saputridulu-oke-gas-dukung-prabowo-gibran-kini-dikritik-habis-habisan	Representasi komika pro-kekuasaan
2	Abdur Arsyad	Cenderung Anies–Muhammin	Dukungan terbuka	https://www.inilah.com/abdur-tolak-rp2-miliar-jadi-buzzer-demi-dukung-anies	Komika dengan posisi oposisi

3	Pandji Pragiwaksono	Kritis / independen	Podcast & opini politik	https://news.detik.com/berita/d-4498062/8-fakta-pandji-pragiwaksono-yang-ogah-pilih-prabowo-dan-males-pilih-jokowi	Political influencer digital
4	Ernest Prakasa	Kritis pemerintahan	Kritik kebijakan	https://www.tempo.co/hiburan/kritik-bonus-rolex-untuk-timnas-ernest-prakasa-dan-lindswell-kwok-berbuah-hujatan-1673771#google_vignette	Oposisi digital berbasis isu
5	Bintang Emon	Kritik sistem hukum	Video satire politik	https://www.suara.com/entertainment/2024/08/21/071500/di-luar-dugaan-bintang-emon-malah-dukung-penuh-dharma-pongrekun-jadi-gubernur-jakarta	Viral sebagai kritik hukum
6	Ge Pamungkas	Netral-kritis	Komentator sosial	https://www.tempo.co/politik/aliansi-perempuan-indonesia-bakal-gelar-demo-di-dpr-besok-3-september-2065775	Menghindari afiliasi eksplisit
7	Soleh Solihun	Moderat	Diskusi podcast	https://www.suara.com/news/2024/02/11/080000/menerakarah-dukungan-anggota-the-prediksi-di-pilpres-mayoritas-prabowo-gibran	Pendekatan reflektif
8	Raditya Dika	Netral	Konten hiburan	https://aceh.tribunnews.com/2024/08/22/posting-peringatan-darurat-nama-raditya-dika-jadi-trending-twitter	Minim keterlibatan politik
9	Adjis Doaibu	Kritis sosial	Stand up & podcast	https://www.detik.com/jogja/berita/d-7502651/arie-kriting-bintang-emon-ikut-aksi-tolak-revisi-uu-pilkada-di-dpr	Kritik kelas & sosial
10	Arie Kriting	Kritis isu daerah	Narasi ketimpangan	https://www.detik.com/jogja/berita/d-7502651/arie-kriting-bintang-emon-ikut-aksi-tolak-revisi-uu-pilkada-di-dpr	Representasi Indonesia Timur

Fenomena keterlibatan komika dalam politik semakin terlihat jelas dalam Pemilu

Presiden Indonesia 2024. Sejumlah komika menunjukkan indikasi keberpihakan terhadap kandidat tertentu melalui berbagai bentuk ekspresi digital. Misalnya, Kiky Saputri diberitakan memiliki kedekatan dengan elit politik dan menunjukkan dukungan terhadap pasangan Prabowo–Gibran melalui berbagai konten media (Suara.com, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa humor tidak lagi netral, tetapi telah menjadi medium politik yang strategis. Humor berfungsi sebagai alat komunikasi yang mampu menyampaikan pesan ideologis secara halus namun efektif.

Selain itu, Abdur Arsyad secara terbuka menunjukkan dukungan terhadap pasangan Anies–Muhaimin dalam Pemilu 2024. Bahkan, dalam pemberitaan media, ia disebut menolak tawaran finansial untuk menjadi buzzer demi mempertahankan pilihan politiknya (Inilah.com, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa komika tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga aktor aktif dalam kontestasi politik. Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa humor dapat menjadi medium ekspresi ideologi politik yang kuat. Dengan demikian, komika berperan sebagai agen komunikasi politik yang memiliki posisi strategis dalam demokrasi digital.

Keterlibatan komika dalam politik juga terlihat dari aktivitas Pandji Pragiwaksono yang kerap menyampaikan pandangan politik melalui media sosial dan podcast. Dalam beberapa kesempatan, ia menunjukkan sikap kritis terhadap kandidat politik dan bahkan pernah terlibat dalam tim sukses politik sebelumnya (Detik, 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa komika dapat bertransformasi menjadi *political influencer*. Posisi ini memberikan mereka kekuatan dalam membentuk opini publik. Dengan demikian, peran komika dalam komunikasi politik tidak dapat lagi dianggap remeh.

Fenomena serupa juga dapat dilihat pada Ernest Prakasa yang sering menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial. Kritik tersebut bahkan memicu respons publik yang luas, termasuk dukungan dan penolakan dari netizen (Tempo, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa humor dapat menjadi sarana kritik politik yang efektif. Namun, di sisi lain, hal ini juga memicu polarisasi dalam

masyarakat. Dengan demikian, humor memiliki potensi sebagai alat konstruksi konflik dalam ruang digital.

Peran humor sebagai alat kritik politik juga terlihat dalam karya Bintang Emon yang dikenal melalui video satire politiknya. Konten yang ia produksi sering kali viral dan menjadi bahan diskusi publik. Hal ini menunjukkan bahwa humor memiliki daya tarik yang tinggi dalam komunikasi digital. Menurut Henry Jenkins, budaya partisipatif memungkinkan konten seperti ini direproduksi dan disebarkan secara luas oleh pengguna (Jenkins, 2006). Dengan demikian, humor menjadi bagian dari budaya digital yang bersifat kolaboratif.

Selain itu, komika seperti Arie Kriting dan Adjis Doaibu juga terlibat dalam aksi demonstrasi menolak revisi UU Pilkada di DPR (Detik, 2024). Keterlibatan ini menunjukkan bahwa komika tidak hanya berperan dalam ruang digital, tetapi juga dalam aksi politik langsung. Hal ini memperkuat argumen bahwa komika adalah aktor politik yang aktif. Dengan demikian, humor tidak lagi terbatas pada ruang hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari praktik politik. Fenomena ini memperlihatkan perluasan fungsi komedi dalam masyarakat modern.

Sementara itu, Raditya Dika yang dikenal cenderung netral pun turut menunjukkan keterlibatan politik melalui unggahan media sosial terkait isu Pilkada (Tribunnews, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa bahkan komika yang sebelumnya apolitis dapat terdorong untuk terlibat dalam diskursus politik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ruang digital memiliki daya tarik yang kuat dalam memobilisasi partisipasi politik. Dengan demikian, batas antara hiburan dan politik menjadi semakin kabur. Kondisi ini merupakan ciri khas dari era *cyber democracy*.

Transformasi ini menunjukkan pergeseran fungsi humor dalam masyarakat. Jika sebelumnya humor berfungsi sebagai kritik sosial yang relatif netral, kini humor menjadi sarana framing politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Marshall McLuhan bahwa medium komunikasi membentuk cara berpikir masyarakat (McLuhan, 1964). Dalam konteks ini, media digital mengubah cara humor diproduksi dan dikonsumsi. Humor menjadi

lebih cepat, viral, dan emosional. Akibatnya, pesan politik yang disampaikan melalui humor menjadi lebih efektif.

Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui teori hegemoni dari Antonio Gramsci yang menyatakan bahwa kekuasaan bekerja melalui dominasi budaya (Gramsci, 1971). Dalam konteks ini, humor menjadi alat untuk membentuk kesadaran publik. Komika dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu politik tertentu. Dengan demikian, humor menjadi bagian dari proses produksi ideologi. Hal ini menunjukkan bahwa humor memiliki dimensi politik yang kuat.

Dalam perspektif lain, Jean Baudrillard menjelaskan bahwa dalam era digital, realitas sering kali digantikan oleh simulasi (Baudrillard, 1994). Humor politik yang viral dapat menciptakan realitas semu yang lebih dipercaya oleh publik dibandingkan fakta. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi digital memiliki kekuatan dalam membentuk persepsi. Dengan demikian, humor dapat menjadi alat manipulasi realitas. Fenomena ini menjadi tantangan bagi demokrasi modern.

Peran media sosial dalam memperkuat fenomena ini juga tidak dapat diabaikan. Menurut Christian Fuchs, algoritma media sosial memiliki peran dalam menentukan distribusi informasi (Fuchs, 2017). Konten yang bersifat emosional dan kontroversial cenderung lebih mudah viral. Humor politik memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, humor menjadi alat komunikasi yang sangat efektif dalam era digital.

Dalam konteks Indonesia, Merlyna Lim menjelaskan bahwa media sosial dapat menciptakan *algorithmic enclaves* yang memperkuat polarisasi politik (Lim, 2017). Humor politik yang viral dapat memperkuat identitas kelompok. Hal ini dapat menyebabkan fragmentasi sosial. Dengan demikian, humor memiliki dampak sosial yang signifikan. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji secara akademik.

Berdasarkan fenomena tersebut, muncul konsep *ultra komunika*. Konsep ini merujuk pada bentuk komunikasi hiper-digital yang ditandai oleh viralitas, emosi, dan reproduksi algoritmik. Dalam konteks ini, pesan tidak

hanya disampaikan, tetapi juga direproduksi secara terus-menerus. Humor menjadi medium yang sangat efektif dalam proses ini. Dengan demikian, *ultra komunika* menjadi karakter utama komunikasi politik digital.

Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi politik modern tidak lagi bergantung pada rasionalitas semata. Emosi dan viralitas menjadi faktor utama dalam mempengaruhi opini publik. Komika memiliki keunggulan dalam hal ini karena mampu mengemas pesan politik dalam bentuk hiburan. Hal ini membuat pesan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, komika memiliki peran strategis dalam komunikasi politik.

Namun demikian, keterlibatan komika dalam politik juga menimbulkan dilema etis. Di satu sisi, mereka memiliki hak politik sebagai warga negara. Di sisi lain, keberpihakan mereka dapat mengurangi independensi humor. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran komedi dalam masyarakat. Apakah komedi masih dapat berfungsi sebagai kritik independen?

Fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran dalam struktur kekuasaan komunikasi. Media arus utama tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Komika dan influencer menjadi aktor penting dalam distribusi informasi. Hal ini menunjukkan terjadinya desentralisasi komunikasi politik. Dengan demikian, demokrasi menjadi lebih kompleks.

Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan bahwa komunikasi politik semakin terpersonalisasi. Komika membangun hubungan langsung dengan audiens melalui media sosial. Hal ini menciptakan kedekatan emosional. Dengan demikian, pesan politik menjadi lebih efektif. Fenomena ini memperkuat konsep *parasocial interaction* dalam komunikasi digital.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana humor bekerja sebagai alat propaganda. Humor dapat menyampaikan pesan politik tanpa terasa sebagai propaganda. Hal ini membuatnya lebih efektif dibandingkan komunikasi formal. Dengan demikian, humor

menjadi alat yang sangat strategis dalam politik.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa batas antara hiburan dan propaganda semakin kabur. Komika tidak hanya menghibur, tetapi juga mempengaruhi opini publik. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik telah mengalami transformasi. Dengan demikian, studi tentang humor politik menjadi sangat relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena *ultra komika* dalam stand up comedy. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana keberpihakan komika mempengaruhi komunikasi politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian komunikasi politik digital.

METODE

Metode penelitian dalam kajian *Ultra Komika dalam Stand Up Comedy di Era Cyber Democracy* menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan fenomena komunikasi politik berbasis humor yang diproduksi oleh komika dalam ruang digital. Menurut John W. Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui interpretasi mendalam terhadap data. Dalam konteks ini, penelitian berusaha mengungkap bagaimana komika berperan sebagai aktor politik non-formal dalam ekosistem cyber democracy. Data penelitian bersumber dari konten stand up comedy, video media sosial, serta pemberitaan daring yang memuat indikasi keberpihakan politik komika. Selain itu, data juga diperoleh dari interaksi audiens seperti komentar, like, dan share sebagai bentuk partisipasi digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi digital difokuskan pada platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok untuk melihat bagaimana konten humor politik diproduksi dan didistribusikan.

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan materi stand up comedy, potongan video viral, serta artikel berita yang relevan dengan posisi politik komika. Studi literatur digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis yang mengacu pada konsep cyber democracy (Fuchs, 2014; Dahlgren, 2005), hegemoni (Gramsci, 1971), serta budaya partisipatif (Jenkins, 2006). Teknik ini sejalan dengan pandangan Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (2011) yang menekankan pentingnya triangulasi data untuk meningkatkan validitas penelitian kualitatif. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan interaktif.

No	Penulis, Tahun	Judul Jurnal	Nama Jurnal	Metodologi	Hasil Penelitian	Relevansi	Gap Penelitian
1	Davis, Love & Killen (2018)	Series of Fun: The Political Work of Humor on Social Media	New Media & Society (Q1)	Big data + analisis konten Twitter	Humor politik memiliki daya tarik tinggi dan berfungsi sebagai alat komunikasi politik serius (Sage Journals)	Menjelaskan hubungan humor dan politik digital	Belum spesifik pada stand up comedy sebagai media
2	Heiss & Matthews (2021)	Funny Cats and Politics	Communication Research (Q1)	Eksperimen	Humor dapat meningkatkan atau menghambat pemahaman politik tergantung konteks (Sage Journals)	Relevan dengan efek humor dalam komunikasi politik	Tidak membahas produksi konten oleh komika
3	Saxena & Ofori-Parku (2024)	Funny Politics: Stand-up Political Comedy	Media Asia (Q2/Q3)	Survei kuantitatif	Stand up comedy meningkatkan engagement, critical thinking, dan opinion	Sangat relevan dengan peran komika dalam	Belum mengkaji konten eks cyber democra

Submitted: May 2026, Accepted: July 2026, Published: August 2026

					sharing (Sage Journals)	m dem okra si digit al	cy seca ra teori tis				Gov ernm ent	(Sinta 2)		dan ketimpa ngan (E-JOURN AL)	dan resist ensi	orm digit al seca ra men da la m
4	Maro nikol akis et al. (2020)	Anal yzin g Polit ical Paro dy in Soci al Media	Comp utatio nal Com munication (Q2)	Mac hine learn ing & NLP	Parodi politik dapat diidentif ikasi secara sistematis dan memiliki pola linguistik tertentu	Rele van deng an prod uksi hum or digit al	Tida k me mba has dim ensi ideo logi dan keku asaan		9	Indra et al. (2024)	Anal isis isi pesa n polit ik berb entu k hum or mela lui medi a TikT ok	JECC O (Sinta 3)	Anal isis isi	Humor politik (satire, parodi) efektif menarik perhatian publik (Jecco)	Rele van deng an cybe r dem ocracy & budaya parti sipatif	Tida k foku s pada stand up com edy
5	Yang et al. (2016)	Soci al Polit ics: Age nda Setti ng on Soci al Media	Social Netwo rk Analy sis (Q2)	Big data Twit ter	Media sosial memben tuk agenda politik dan diskursu s publik	Rele van deng an cybe r dem ocracy	Tida k foku s pada hum or seba gai med ium		10	Astuti & Wula ndari (2024)	Satir e Media Sosi al dan Pers epsi Polit ik Gen Z	JISPO (Sinta 2)	Kual itatif	Humor satire memben tuk persepsi politik generasi muda (eJourn al UIN Sunan Gunung Djati)	Rele van deng an efek hum or digit al	Belu m men gkaji akto r kom ika seba gai prod usen uta ma
6	Ashar i & Mahad ian (2020)	Kritik Com ic dala m Kom petisi Kritik DPR 2018	Jurnal Komunikasi (Sinta 2)	Anal isis wac ana kriti s	Stand up comedy berfungs i sebagai media kritik politik dan demokra si (Jurnal Universitas Islam Indonesia)	Men guat kan fungs i komika seba gai aktor politika	Belu m men gait kan deng an med ia digit al									
7	Ibrahi m et al. (2025)	Strategi linguistik dala m kritik politik stand-up comedy Indonesia	Diglos ia (Sinta 2)	Criti cal Disc ours e Anal ysis	Humor menggu nakan metafor a, ironi, dan satire untuk mengun gkap kekuasa an (diglosia unmul.com)	Rele van deng an anali sis waca na kritis	Tida k me mba has parti sipa si audi ens digit al									
8	Siho mbin g (2022)	Satir ical Hum or as Criti cs of	Profet ik: Jurnal Komunikasi	Kual itatif	Komika menyuar akan kritik sosial-politik	Rele van deng an hege moni	Belu m me mba has platf									

Teknik analisis data menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk (1998). Analisis ini dilakukan dengan mengkaji struktur teks (pilihan kata, metafora, narasi humor), kognisi sosial (bagaimana audiens memahami pesan), serta konteks sosial (relasi kekuasaan dan ideologi dalam komunikasi digital). Selain itu, analisis juga mengintegrasikan perspektif simulasi dan hiperrealitas dari Jean Baudrillard (1994) untuk memahami konstruksi realitas dalam humor politik, serta teori jaringan dari Manuel Castells (2012) untuk melihat distribusi kekuasaan dalam media digital. Proses analisis dilakukan secara bertahap mulai dari reduksi data, kategorisasi, hingga interpretasi makna untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap dimensi ideologis, partisipatif, dan simbolik dari praktik ultra komunikasi dalam stand up comedy.

HASIL DAN PEMBAHASAN**HASIL PENELITIAN****Pemetaan Posisi Komika dalam Lanskap Politik Digital**

Pemetaan posisi komika dalam lanskap politik digital menunjukkan adanya transformasi mendasar dalam praktik komunikasi politik di era cyber democracy. Komika di Indonesia tidak lagi berada dalam posisi netral sebagai entertainer semata, melainkan telah berkembang menjadi aktor komunikasi politik yang memiliki pengaruh signifikan dalam ruang publik digital. Fenomena ini sejalan dengan pemikiran Christian Fuchs (2014) yang menekankan bahwa media digital membuka ruang baru bagi aktor non-institusional untuk terlibat dalam produksi dan distribusi informasi politik. Dalam konteks ini, stand up comedy menjadi medium yang strategis karena mampu mengemas isu politik dalam bentuk yang lebih ringan dan mudah diterima. Dengan demikian, komika memiliki peran penting dalam membentuk opini publik melalui pendekatan humor.

Perkembangan ini juga berkaitan erat dengan perubahan struktur ruang publik yang semakin terdigitalisasi. Peter Dahlgren (2005) menjelaskan bahwa demokrasi digital memungkinkan partisipasi warga dalam diskursus politik melalui berbagai bentuk interaksi online. Komika memanfaatkan platform seperti YouTube, Instagram, dan podcast untuk menyampaikan pesan politik secara langsung kepada audiens. Hal ini menghilangkan ketergantungan pada media konvensional sebagai gatekeeper informasi. Akibatnya, komunikasi politik menjadi lebih cair, terbuka, dan partisipatif. Dalam kondisi ini, komika menjadi bagian dari aktor penting dalam ekosistem komunikasi politik digital.

N o	Komika	Posisi Ideologis	Indikasi Keberpihakan	Karakter Ekspresi	Peran dalam Cyber Democracy	Catatan Analisis
1	Kiky Saputri	Pro-kekuasaan	Kedekatan dengan elite politik	Konten politik, endorsement	Aktor politik non-formal	Representasi komika yang berfungsi sebagai

						legitimasi kekuasaan
2	Abdur Arsyad	Oposisi	Dukungan terbuka pada kandidat tertentu	Narasi kritik dan dukungan politik	Voice of opposition	Komika sebagai agen resistensi politik
3	Pandji Pragiwaksono	Kritis-independen	Tidak terafiliasi langsung	Podcast, opini politik	Political influencer digital	Membenutuk opini publik melalui diskursus
4	Ernest Prakasa	Kritis kebijakan	Kritik terhadap isu pemerintahan	Kritik sosial-politik	Oposisi berbas is isu	Menyuarakan kritik tanpa afiliasi politik eksplisit
5	Bintang Emon	Kritis struktural	Kritik sistem hukum	Video satire politik	Agen kritik sosial	Viral sebagai representasi kritik hukum
6	Arie Kriting	Kritis regional	Fokus isu ketimpangan daerah	Narasi ketimpangan sosial	Representasi daerah	Mengangkat isu Indonesia Timur
7	Raditya Dika	Netral	Minim keterlibatan politik	Konten hiburan	Entertainer digital	Menghindari politisasi konten
8	Ge Pamungkas	Netral-kritis	Komentar sosial tanpa afiliasi	Observasi sosial	Komentator sosial	Posisi hati-hati dalam politik
9	Soleh Solihun	Moderat	Diskusi reflektif	Podcast & diskusi	Mediator diskusi	Pendekatan dialogis dan reflektif
10	Adjis Doaibu	Kritis sosial	Kritik kelas & ketimpangan	Stand up & podcast	Agen kritik sosial	Fokus pada isu kelas dan struktur sosial

Variasi posisi ideologis komika mencerminkan kompleksitas relasi kekuasaan dalam ruang digital. Komika seperti Kiky

Saputri menunjukkan kecenderungan pro-kekuasaan melalui kedekatannya dengan elite politik dan keterlibatannya dalam berbagai konten yang bersifat politis. Dalam perspektif Antonio Gramsci (1971), posisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari praktik hegemoni, di mana ideologi dominan direproduksi melalui media budaya populer. Humor yang disampaikan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, komika berperan dalam memperkuat konsensus sosial terhadap kekuasaan yang ada.

Sebaliknya, Abdur Arsyad merepresentasikan posisi oposisi yang lebih eksplisit dalam lanskap politik digital. Dukungan terbuka terhadap kandidat tertentu menunjukkan bahwa komika dapat berfungsi sebagai agen resistensi terhadap kekuasaan dominan. Dalam kerangka hegemoni, posisi ini mencerminkan upaya counter-hegemonic untuk menantang narasi dominan yang berkembang di masyarakat. Humor menjadi medium yang efektif untuk menyampaikan kritik karena sifatnya yang tidak konfrontatif namun tetap tajam. Hal ini menunjukkan bahwa stand up comedy dapat menjadi alat perjuangan ideologis.

Sementara itu, Pandji Pragiwaksono menempati posisi kritis-independen dengan memanfaatkan platform digital seperti podcast dan media sosial untuk membangun diskursus politik. Ia tidak secara eksplisit terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu, tetapi tetap aktif menyuarakan opini dan kritik. Dalam konteks masyarakat jaringan, Manuel Castells (2012) menyebut aktor seperti ini sebagai bagian dari jaringan komunikasi yang memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik. Pandji berfungsi sebagai political influencer digital yang mengandalkan kredibilitas personal dan basis audiensnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan komunikasi tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan terdistribusi.

Komika seperti Ernest Prakasa juga menunjukkan posisi kritis, tetapi dengan pendekatan berbasis isu. Kritik terhadap kebijakan pemerintah menjadi fokus utama dalam narasi humor yang ia bangun. Penelitian Ashari dan Mahadian (2020) menunjukkan

bahwa stand up comedy dapat berfungsi sebagai media kritik politik yang efektif dalam demokrasi. Dalam hal ini, Ernest tidak hanya menyampaikan hiburan, tetapi juga mendorong kesadaran publik terhadap isu-isu sosial-politik. Hal ini memperkuat peran komika sebagai aktor dalam komunikasi politik digital.

Selanjutnya, Bintang Emon menampilkan kritik struktural yang tajam, terutama terhadap sistem hukum. Melalui video satire yang viral, ia mampu menarik perhatian publik dan memicu diskursus luas. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep hiperrealitas Jean Baudrillard (1994), di mana representasi humor dapat membentuk persepsi publik yang lebih kuat daripada realitas objektif. Konten yang viral sering kali lebih berpengaruh dibandingkan informasi faktual. Dengan demikian, komika menjadi produsen realitas simbolik dalam ruang digital.

Arie Kriting menghadirkan perspektif yang berbeda dengan menyoroti isu ketimpangan regional, khususnya Indonesia Timur. Narasi yang dibangun tidak hanya bersifat kritik, tetapi juga representasi pengalaman sosial yang jarang mendapat perhatian dalam diskursus nasional. Dalam kerangka budaya partisipatif Henry Jenkins (2006), konten seperti ini dapat memicu keterlibatan audiens dalam diskusi yang lebih luas. Komika berperan sebagai mediator antara pengalaman lokal dan wacana nasional. Hal ini memperkaya keberagaman perspektif dalam komunikasi politik digital.

Di sisi lain, Raditya Dika memilih untuk tetap berada dalam ranah hiburan tanpa keterlibatan politik yang signifikan. Posisi ini menunjukkan bahwa tidak semua komika terlibat dalam komunikasi politik secara aktif. Namun demikian, pilihan untuk netral juga merupakan bagian dari strategi komunikasi dalam mempertahankan audiens yang luas. Dalam konteks ini, netralitas dapat dilihat sebagai bentuk resistensi terhadap politisasi konten. Hal ini menunjukkan bahwa posisi ideologis komika sangat dipengaruhi oleh pertimbangan strategis.

Ge Pamungkas menempati posisi netral-kritis dengan pendekatan observasi sosial. Ia menyampaikan kritik tanpa menunjukkan keberpihakan politik yang eksplisit. Pendekatan

ini memungkinkan komika untuk tetap relevan dalam diskursus politik tanpa terjebak dalam polarisasi. Dalam perspektif komunikasi politik, strategi ini dapat meningkatkan kredibilitas di mata audiens. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk ekspresi humor juga mempengaruhi persepsi publik terhadap pesan yang disampaikan.

Soleh Solihun menghadirkan pendekatan moderat melalui diskusi podcast yang reflektif. Ia berperan sebagai mediator diskursus yang mendorong dialog terbuka antara berbagai perspektif. Dalam konteks cyber democracy, peran ini penting untuk menjaga kualitas deliberasi publik. Pendekatan dialogis ini sejalan dengan gagasan Jürgen Habermas (1989) tentang ruang publik yang rasional dan inklusif. Komika tidak hanya menjadi penyampai pesan, tetapi juga fasilitator komunikasi.

Adjis Doaibu menonjol sebagai komika yang fokus pada kritik kelas dan struktur sosial. Materi yang disampaikan sering kali mengangkat isu ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Dalam analisis Teun A. van Dijk (1998), narasi seperti ini dapat mengungkap relasi kekuasaan yang tersembunyi dalam masyarakat. Humor menjadi alat untuk membongkar struktur dominasi yang tidak terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa stand up comedy memiliki dimensi ideologis yang kuat.

Keberagaman posisi komika menunjukkan bahwa stand up comedy merupakan ruang diskursif yang heterogen. Tidak ada satu narasi dominan yang sepenuhnya menguasai ruang ini, melainkan berbagai perspektif yang saling berinteraksi dan berkompetisi. Hal ini sejalan dengan temuan Davis, Love, dan Killen (2018) yang menyatakan bahwa humor di media sosial memiliki fungsi politik yang signifikan. Humor tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuknya. Dengan demikian, stand up comedy menjadi arena kontestasi ideologi.

Partisipasi audiens juga memainkan peran penting dalam memperkuat posisi komika dalam cyber democracy. Audiens tidak lagi pasif, tetapi aktif dalam memproduksi dan mendistribusikan konten melalui komentar, share, dan remix. Jenkins (2006) menyebut

fenomena ini sebagai budaya partisipatif. Dalam konteks ini, pesan humor dapat berkembang dan mengalami transformasi melalui interaksi digital. Hal ini memperluas jangkauan dan dampak komunikasi politik yang dilakukan oleh komika.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari komunikasi politik yang bersifat top-down menuju model yang lebih horizontal dan berbasis jaringan. Manuel Castells (2012) menekankan bahwa dalam masyarakat jaringan, kekuasaan terdistribusi melalui relasi komunikasi yang kompleks. Komika menjadi node penting dalam jaringan tersebut karena memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam komunikasi politik tidak lagi terpusat pada institusi formal.

Secara keseluruhan, pemetaan posisi komika dalam lanskap politik digital menunjukkan bahwa stand up comedy telah menjadi bagian integral dari komunikasi politik modern. Komika tidak hanya berperan sebagai entertainer, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik. Variasi posisi ideologis mencerminkan kompleksitas dinamika kekuasaan dalam ruang digital. Dengan demikian, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk ultra komika yang menggabungkan humor, teknologi, dan politik dalam satu ruang interaksi yang dinamis.

Bentuk Ekspresi Ultra Komika dalam Stand Up Comedy

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik komunikasi politik kontemporer. Internet dan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi informasi, tetapi juga menjadi ruang produksi makna dan kontestasi wacana publik. Dalam perspektif cyber democracy, ruang digital memungkinkan terjadinya partisipasi warga secara lebih luas dan interaktif (Dahlgren, 2013). Hal ini menggeser pola komunikasi politik dari model top-down menjadi lebih horizontal dan dialogis. Dengan demikian, aktor komunikasi tidak lagi terbatas pada elite politik formal, melainkan meluas ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk komika.

Fenomena ini semakin relevan dalam konteks Indonesia, khususnya pada momentum politik seperti Pemilu 2024. Dalam situasi tersebut, ruang digital menjadi arena utama pertarungan narasi politik yang melibatkan berbagai aktor non-tradisional. Komika sebagai bagian dari industri kreatif turut mengambil peran dalam menyampaikan pesan politik melalui medium humor. Transformasi ini menunjukkan bahwa batas antara hiburan dan politik semakin kabur dalam era digital. Sejalan dengan itu, Jenkins (2006) menekankan bahwa budaya partisipatif memungkinkan publik tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen konten politik.

Dalam konteks ini, stand up comedy mengalami transformasi dari sekadar hiburan menjadi medium komunikasi politik yang strategis. Komika tidak hanya tampil di panggung konvensional, tetapi juga memanfaatkan platform digital seperti YouTube, Instagram, dan podcast. Platform ini memungkinkan distribusi pesan secara luas dan cepat, bahkan melampaui batas geografis. Menurut Castells (2012), masyarakat jaringan (network society) ditandai oleh arus informasi yang cepat dan terhubung secara global. Oleh karena itu, konten stand up comedy yang mengandung kritik politik dapat dengan mudah menjadi viral dan mempengaruhi opini publik.

Konsep ultra komunika muncul sebagai bentuk komunikasi hiper-digital yang ditandai oleh intensitas, kecepatan, dan reproduksi simbolik yang tinggi. Dalam konteks ini, pesan tidak hanya disampaikan, tetapi juga direplikasi, dimodifikasi, dan disebarluaskan secara masif melalui algoritma media sosial. Fenomena ini memperkuat peran humor sebagai alat komunikasi yang efektif dalam menjangkau audiens luas. McLuhan (1964) menyatakan bahwa medium komunikasi mempengaruhi cara pesan dipahami, sehingga platform digital turut membentuk karakter komunikasi humor politik.

Humor dalam stand up comedy memiliki kemampuan untuk menyederhanakan isu kompleks menjadi narasi yang mudah dipahami. Melalui teknik satire, ironi, dan hiperbola, komika mampu mengemas kritik politik menjadi lebih ringan namun tetap tajam. Menurut Meyer (2000), humor memiliki fungsi

retoris yang dapat memperkuat pesan sekaligus menciptakan kedekatan dengan audiens. Dalam konteks ini, humor tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat persuasi politik yang efektif.

Lebih lanjut, penggunaan humor dalam komunikasi politik juga berkaitan dengan teori framing. Entman (1993) menjelaskan bahwa framing adalah proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas untuk membentuk persepsi publik. Komika secara tidak langsung melakukan framing melalui materi stand up mereka, terutama ketika membahas isu-isu politik dan sosial. Dengan demikian, humor menjadi instrumen strategis dalam membentuk opini publik di era digital.

Fenomena keterlibatan komika dalam isu politik juga dapat dilihat dari praktik nyata di Indonesia. Misalnya, Bintang Emon dikenal melalui konten satire yang mengkritik sistem hukum, sementara Arie Kriting sering mengangkat isu ketimpangan wilayah Indonesia Timur. Keduanya bahkan terlibat dalam aksi sosial-politik seperti demonstrasi penolakan revisi UU Pilkada, yang menunjukkan bahwa komika tidak hanya berperan di ruang digital, tetapi juga di ruang publik nyata. Hal ini memperkuat argumen bahwa komika telah menjadi aktor komunikasi politik.

Selain itu, komika seperti Pandji Pragiwaksono dan Ernest Prakasa menunjukkan bentuk ekspresi politik yang lebih diskursif melalui podcast dan media sosial. Mereka menggunakan pendekatan argumentatif dan reflektif dalam membahas isu-isu kebijakan publik. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi gaya komunikasi di antara komika dalam menyampaikan pesan politik. Menurut Habermas (1989), ruang publik ideal adalah ruang diskursus rasional, dan praktik ini dapat dilihat dalam konten-konten yang mereka produksi.

Di sisi lain, terdapat juga komika seperti Raditya Dika yang cenderung menjaga jarak dari politik praktis dan tetap fokus pada konten hiburan. Namun, bahkan dalam posisi tersebut, keterlibatan minimal dalam isu politik tetap tidak dapat dihindari dalam era digital. Hal ini menunjukkan bahwa netralitas dalam ruang digital menjadi semakin sulit dipertahankan.

Menurut Van Dijk (2013), media sosial memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik secara tidak langsung melalui eksposur konten.

Konvergensi antara hiburan dan politik dalam stand up comedy menunjukkan bahwa budaya populer memiliki peran penting dalam demokrasi digital. Street (2004) menyatakan bahwa selebritas dan figur publik dapat berfungsi sebagai agen politik yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Dalam konteks ini, komika menjadi bagian dari political influencer yang memiliki basis audiens yang kuat. Dengan demikian, mereka memiliki potensi besar dalam membentuk opini publik melalui konten humor.

Fenomena ultra komunika dalam stand up comedy juga tidak dapat dilepaskan dari peran algoritma media sosial. Algoritma menentukan visibilitas konten dan mempercepat proses viralitas. Menurut Gillespie (2018), algoritma tidak bersifat netral, melainkan memiliki implikasi politik dalam menentukan apa yang dilihat oleh publik. Oleh karena itu, konten humor politik yang viral tidak hanya mencerminkan preferensi audiens, tetapi juga hasil dari mekanisme platform digital.

Dalam konteks ini, humor politik dapat berfungsi sebagai alat propaganda maupun kritik sosial. Bergson (1911) melihat humor sebagai mekanisme sosial yang dapat mengoreksi perilaku masyarakat. Namun, dalam era digital, humor juga dapat digunakan untuk membangun narasi tertentu yang menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan ambivalensi fungsi humor dalam komunikasi politik.

Dengan demikian, fenomena ultra komunika dalam stand up comedy di era cyber democracy menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam praktik komunikasi politik. Komika tidak lagi sekadar entertainer, tetapi juga aktor politik yang berperan dalam membentuk opini publik. Variasi bentuk ekspresi, mulai dari satire hingga diskursus kritis, menunjukkan kompleksitas peran mereka dalam ruang digital. Hal ini menegaskan bahwa humor telah menjadi bagian integral dari komunikasi politik modern.

Akhirnya, penting untuk memahami bahwa fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan media, tetapi juga perubahan budaya komunikasi masyarakat. Partisipasi publik yang semakin aktif dalam ruang digital menciptakan dinamika baru dalam demokrasi. Stand up comedy sebagai medium komunikasi menjadi salah satu contoh bagaimana budaya populer dapat berkontribusi dalam proses demokratisasi. Oleh karena itu, kajian tentang ultra komunika menjadi relevan untuk memahami perkembangan komunikasi politik di era digital.

Interaksi Audiens dan Budaya Partisipatif

Perkembangan komunikasi digital telah mengubah secara fundamental posisi audiens dalam ekosistem media. Jika sebelumnya audiens diposisikan sebagai penerima pasif, dalam era cyber democracy mereka bertransformasi menjadi aktor aktif yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan reinterpretasi pesan (Jenkins, 2006). Interaksi sederhana seperti like, share, dan komentar tidak lagi sekadar bentuk respons, tetapi telah menjadi indikator partisipasi politik digital. Dalam konteks ini, audiens memiliki peran strategis dalam memperkuat fenomena ultra komunika, khususnya dalam penyebaran humor politik melalui stand up comedy. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak lagi dimonopoli oleh elite, melainkan menjadi proses kolektif berbasis jaringan.

Budaya partisipatif menjadi landasan utama dalam memahami dinamika ini. Henry Jenkins (2006) menjelaskan bahwa budaya partisipatif ditandai oleh rendahnya hambatan untuk berkontribusi serta tingginya keterlibatan pengguna dalam produksi konten. Dalam konteks stand up comedy, materi komika tidak berhenti pada performa panggung atau unggahan asli, tetapi mengalami transformasi melalui interaksi audiens. Konten tersebut sering dipotong, diedit, dan disebarluaskan kembali dalam bentuk meme, video pendek, atau remix digital. Proses ini menunjukkan bahwa audiens tidak hanya mengonsumsi pesan, tetapi juga menjadi co-creator dalam membentuk makna.

Fenomena ini memperkuat konsep masyarakat jaringan yang dikemukakan oleh Castells (2012), di mana arus informasi bersifat

terdesentralisasi dan bergerak secara cepat melalui konektivitas digital. Audiens memiliki kekuatan untuk menentukan visibilitas suatu konten melalui mekanisme viralitas. Ketika sebuah materi stand up comedy dianggap relevan atau menarik, audiens akan secara sukarela menyebarkannya ke berbagai platform. Hal ini menyebabkan pesan humor politik dapat menjangkau audiens yang lebih luas, bahkan melampaui konteks awalnya. Dengan demikian, kekuatan distribusi tidak lagi berada pada produsen konten, tetapi pada jaringan audiens itu sendiri.

Lebih lanjut, interaksi audiens juga menciptakan dinamika komunikasi yang bersifat horizontal. Tidak ada lagi hierarki yang kaku antara produsen dan konsumen pesan, karena keduanya saling berinteraksi dalam ruang digital. Menurut Shirky (2008), media sosial memungkinkan terbentuknya kolaborasi massal yang mengubah cara informasi diproduksi dan disebar. Dalam konteks ini, audiens dapat memberikan interpretasi baru terhadap materi humor yang disampaikan oleh komika. Interpretasi tersebut kemudian beredar kembali dalam bentuk komentar, diskusi, atau bahkan konten turunan yang memperkaya makna awal.

Dalam praktiknya, fenomena ini dapat dilihat dari bagaimana materi komika seperti Bintang Emon sering diubah menjadi potongan video pendek yang viral di berbagai platform. Audiens mengambil bagian tertentu yang dianggap paling relevan, kemudian menyebarkannya dengan konteks baru. Hal yang sama juga terjadi pada konten Pandji Pragiwaksono yang sering menjadi bahan diskusi publik melalui podcast dan media sosial. Proses ini menunjukkan bahwa audiens memiliki peran aktif dalam menentukan narasi mana yang akan berkembang dalam ruang digital.

Namun demikian, partisipasi audiens tidak selalu menghasilkan diskursus yang inklusif. Justru, dalam banyak kasus, interaksi digital cenderung memperkuat fragmentasi opini. Audiens lebih sering berinteraksi dengan konten yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan ideologis mereka. Fenomena ini dikenal sebagai echo chamber, di mana individu hanya terpapar pada informasi yang

memperkuat pandangan mereka sendiri (Sunstein, 2017). Dalam konteks humor politik, hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang bias terhadap pesan yang disampaikan oleh komika.

Algoritma media sosial turut memperkuat fenomena ini. Platform digital dirancang untuk menampilkan konten yang relevan dengan preferensi pengguna, sehingga mempersempit keragaman informasi yang diterima. Gillespie (2018) menekankan bahwa algoritma memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman pengguna di ruang digital. Akibatnya, konten humor politik yang beredar sering kali hanya menjangkau kelompok tertentu yang memiliki kesamaan pandangan. Hal ini memperkuat polarisasi dan menghambat terbentuknya dialog yang konstruktif.

Selain itu, partisipasi audiens juga dapat memunculkan distorsi makna. Ketika konten diubah menjadi meme atau potongan video, konteks asli sering kali hilang atau disederhanakan. Proses ini dapat menyebabkan pesan yang awalnya kompleks menjadi reduktif. Menurut Dawkins (1976), meme sebagai unit budaya memiliki sifat replikasi yang cepat, tetapi tidak selalu mempertahankan makna asli. Dalam konteks ini, humor politik berisiko disalahartikan atau digunakan untuk kepentingan tertentu yang berbeda dari niat awal komika.

Di sisi lain, partisipasi digital tetap memiliki potensi demokratis yang signifikan. Audiens dapat menggunakan ruang digital untuk menyuarakan pendapat, mengkritik kebijakan, dan terlibat dalam diskursus publik. Hal ini sejalan dengan konsep public sphere dari Habermas (1989), meskipun dalam bentuk yang telah mengalami transformasi digital. Stand up comedy menjadi salah satu medium yang memfasilitasi interaksi ini, karena sifatnya yang komunikatif dan mudah diakses. Dengan demikian, humor politik dapat menjadi pintu masuk bagi keterlibatan publik dalam isu-isu sosial dan politik.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa interaksi audiens dalam budaya partisipatif memiliki peran ambivalen dalam fenomena ultra komunika. Di satu sisi, partisipasi ini memperluas jangkauan dan memperkaya

makna pesan humor politik. Di sisi lain, partisipasi tersebut juga berpotensi memperkuat polarisasi dan distorsi informasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa budaya partisipatif tidak selalu identik dengan demokratisasi yang ideal, melainkan merupakan arena kompleks yang penuh dengan negosiasi makna dan kepentingan.

Dimensi Ideologi dan Wacana dalam Humor Politik

Dimensi ideologi dalam humor politik tidak dapat dilepaskan dari cara pesan dikonstruksi dan disampaikan dalam stand up comedy. Humor pada dasarnya bukan sekadar hiburan, melainkan praktik diskursif yang sarat makna dan kepentingan. Dalam perspektif Louis Althusser, ideologi bekerja melalui praktik sehari-hari yang tampak “alami”, termasuk humor, sehingga tanpa disadari ia mereproduksi nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu, pilihan tema, diksi, hingga sudut pandang komika mencerminkan posisi ideologis yang mereka ambil. Dalam konteks ini, humor menjadi medium simbolik yang memproduksi realitas sosial tertentu, bukan sekadar merefleksikannya.

Dalam kajian wacana, humor dapat dipahami sebagai bagian dari praktik representasi yang membentuk makna. Stuart Hall menjelaskan bahwa representasi selalu melibatkan proses encoding dan decoding, di mana pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan secara beragam oleh audiens. Komika sebagai produsen pesan melakukan encoding ideologi melalui materi stand up mereka, sementara audiens melakukan decoding berdasarkan latar belakang sosial dan politik masing-masing. Hal ini menjadikan humor sebagai arena negosiasi makna yang dinamis. Dengan demikian, humor tidak pernah benar-benar netral karena selalu berada dalam struktur kekuasaan tertentu.

Lebih lanjut, humor politik sering kali berfungsi sebagai alat resistensi terhadap dominasi kekuasaan. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif dan tersebar dalam berbagai praktik sosial, termasuk bahasa dan humor. Komika menggunakan satire, ironi, dan parodi untuk membongkar narasi dominan yang dibangun oleh kekuasaan. Kritik terhadap kebijakan publik, praktik korupsi, dan

ketimpangan sosial sering kali disampaikan dalam bentuk humor agar lebih mudah diterima. Strategi ini memungkinkan kritik yang tajam disampaikan tanpa harus berhadapan langsung dengan represi.

Fenomena ini dapat dilihat pada praktik komika seperti Bintang Emon yang menggunakan satire untuk mengkritik sistem hukum di Indonesia. Kontennya sering kali mengangkat isu-isu sensitif dengan pendekatan humor yang ringan namun mengandung kritik struktural. Hal serupa juga dilakukan oleh Arie Kriting yang menyoroti ketimpangan pembangunan antara Indonesia Timur dan Barat. Dalam kedua kasus tersebut, humor menjadi alat artikulasi pengalaman sosial yang sering terpinggirkan dalam wacana arus utama. Dengan demikian, stand up comedy berfungsi sebagai ruang alternatif untuk menyuarakan kritik.

Namun, di sisi lain, humor juga dapat berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ketika komika memiliki kedekatan dengan elite politik, materi humor yang disampaikan cenderung menghindari kritik atau bahkan mendukung narasi tertentu. Dalam perspektif Antonio Gramsci, hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari hegemoni, yaitu proses di mana dominasi ideologi diterima secara sukarela oleh masyarakat. Humor dalam konteks ini berperan dalam menormalisasi kekuasaan dan mengurangi resistensi publik. Dengan kata lain, humor dapat menjadi instrumen soft power yang efektif dalam mempertahankan status quo.

Selain itu, framing dalam humor memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Mengacu pada teori framing oleh Robert Entman, komika memilih aspek tertentu dari realitas untuk ditonjolkan, sementara aspek lain diabaikan. Proses seleksi ini menentukan bagaimana suatu isu dipahami oleh audiens. Dalam humor politik, framing sering dilakukan melalui punchline yang menekankan sudut pandang tertentu secara implisit. Hal ini membuat audiens menerima pesan tanpa merasa sedang “digurui”, sehingga efek persuasinya menjadi lebih kuat.

Dalam era digital, dimensi ideologis humor semakin kompleks karena dipengaruhi oleh mekanisme algoritma dan budaya viral.

Konten stand up comedy yang beredar di media sosial tidak hanya dikonsumsi, tetapi juga direproduksi dalam berbagai bentuk seperti meme dan video pendek. Proses ini dapat memperkuat pesan ideologis tertentu atau bahkan mengubah makna awalnya. Menurut Fairclough (1995), wacana selalu terkait dengan praktik sosial yang lebih luas, sehingga transformasi digital turut mempengaruhi produksi dan distribusi ideologi dalam humor. Dengan demikian, ultra komunika mempercepat sirkulasi wacana ideologis dalam masyarakat.

Di sisi lain, audiens juga berperan dalam menentukan arah wacana yang berkembang. Interpretasi yang berbeda terhadap humor dapat menciptakan polarisasi opini, terutama ketika isu yang diangkat bersifat sensitif. Humor yang dimaksudkan sebagai kritik dapat ditafsirkan sebagai dukungan, atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa makna humor tidak bersifat tetap, melainkan selalu dinegosiasikan dalam interaksi sosial. Dalam konteks ini, stand up comedy menjadi arena diskursif yang terbuka dan penuh kontestasi.

Kompleksitas ini menunjukkan bahwa stand up comedy bukan sekadar ruang hiburan, tetapi juga arena pertarungan wacana yang melibatkan berbagai kepentingan ideologis. Komika, audiens, dan platform digital saling berinteraksi dalam membentuk narasi yang berkembang di ruang publik. Humor menjadi medium yang fleksibel karena mampu menyampaikan pesan serius dalam bentuk yang ringan. Namun, fleksibilitas ini juga membuatnya rentan terhadap manipulasi dan instrumentalitas politik. Oleh karena itu, analisis terhadap humor politik perlu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang melingkupinya.

Dengan demikian, ultra komunika dalam stand up comedy memiliki dimensi ideologis yang sangat kuat dan tidak dapat diabaikan. Humor berfungsi sebagai alat komunikasi yang mampu mereproduksi sekaligus menantang struktur kekuasaan. Ia dapat menjadi sarana emansipasi, tetapi juga dapat digunakan untuk mempertahankan dominasi. Dalam era cyber democracy, pemahaman terhadap dimensi ini menjadi penting untuk melihat bagaimana opini publik dibentuk dan dipengaruhi. Stand up

comedy, dalam hal ini, bukan hanya cermin realitas sosial, tetapi juga aktor aktif dalam membentuknya.

PEMBAHASAN

Ultra Komunika sebagai Transformasi Komunikasi Politik

Ultra komunika dalam stand up comedy merepresentasikan transformasi mendasar dalam komunikasi politik di era cyber democracy. Perubahan ini ditandai oleh pergeseran dari model komunikasi yang bersifat satu arah dan terpusat menuju model yang lebih terbuka, interaktif, dan berbasis jaringan. Dalam paradigma lama, komunikasi politik didominasi oleh aktor formal seperti pemerintah dan media arus utama. Namun, dalam ekosistem digital, aktor non-formal seperti komika turut mengambil peran signifikan dalam membentuk opini publik. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi digital membuka ruang bagi bentuk-bentuk komunikasi yang lebih inklusif dan partisipatif.

Konsep cyber democracy sebagaimana dijelaskan oleh Dahlgren (2013) menekankan pentingnya partisipasi warga dalam ruang digital sebagai bagian dari praktik demokrasi modern. Dalam konteks ini, stand up comedy menjadi salah satu medium alternatif yang memungkinkan terjadinya komunikasi politik yang lebih cair dan dialogis. Komika tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memicu interaksi dan diskusi di antara audiens. Dengan demikian, komunikasi politik tidak lagi bersifat elitis, melainkan menjadi bagian dari budaya populer yang mudah diakses. Transformasi ini memperlihatkan bagaimana batas antara hiburan dan politik semakin kabur.

Temuan Davis, Love, dan Killen (2018) memperkuat argumen bahwa humor di media sosial memiliki fungsi politik yang serius. Humor tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan kritik, membangun solidaritas, dan memobilisasi opini publik. Dalam konteks stand up comedy, humor menjadi strategi komunikasi yang efektif karena mampu menyampaikan pesan kompleks dengan cara yang ringan. Hal ini membuat audiens lebih mudah menerima dan memahami isu-isu politik. Dengan kata lain, humor menjadi

jembatan antara informasi politik dan pemahaman publik.

Lebih lanjut, ultra komunika mencerminkan intensifikasi komunikasi melalui teknologi digital yang memungkinkan penyebaran pesan secara cepat dan masif. Menurut Castells (2012), masyarakat jaringan ditandai oleh arus informasi yang bergerak secara real-time dan melintasi batas geografis. Stand up comedy yang diunggah ke platform digital dapat dengan mudah menjadi viral dan menjangkau audiens global. Proses ini memperkuat posisi komika sebagai aktor komunikasi yang memiliki pengaruh luas. Dengan demikian, ultra komunika tidak hanya mengubah cara pesan disampaikan, tetapi juga memperluas dampaknya.

Dalam praktiknya, komika seperti Pandji Pragiwaksono memanfaatkan platform digital seperti podcast untuk membahas isu-isu politik secara lebih mendalam dan reflektif. Sementara itu, Ernest Prakasa sering menggunakan media sosial untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa komika dapat berfungsi sebagai opinion leader dalam ruang digital. Mereka tidak hanya menghibur, tetapi juga mengedukasi dan mempengaruhi cara berpikir audiens. Hal ini memperkuat peran stand up comedy sebagai medium komunikasi politik.

Penelitian Saxena dan Ofori-Parku (2024) menunjukkan bahwa stand up comedy memiliki potensi untuk meningkatkan engagement dan critical thinking di kalangan audiens. Humor yang disampaikan oleh komika mendorong audiens untuk berpikir kritis terhadap isu-isu yang dibahas. Dalam konteks ini, audiens tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga terlibat dalam proses interpretasi dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan konsep budaya partisipatif yang dikemukakan oleh Jenkins (2006). Dengan demikian, ultra komunika tidak hanya memperluas jangkauan komunikasi, tetapi juga meningkatkan kualitas partisipasi publik.

Transformasi ini juga berkaitan dengan perubahan struktur ruang publik. Habermas (1989) menggambarkan ruang publik sebagai arena diskursus rasional, namun dalam era digital, ruang ini mengalami fragmentasi dan diversifikasi. Stand up comedy menjadi salah

satu bentuk ruang publik alternatif yang menggabungkan elemen hiburan dan diskursus kritis. Meskipun tidak selalu formal, ruang ini tetap memiliki fungsi penting dalam membentuk opini publik. Dengan demikian, ultra komunika menciptakan bentuk baru dari ruang publik yang lebih fleksibel dan dinamis.

Selain itu, ultra komunika juga menunjukkan adanya konvergensi media, di mana berbagai platform digital saling terhubung dalam menyebarkan pesan. Konten stand up comedy tidak hanya berhenti pada satu platform, tetapi dapat didistribusikan ulang dalam berbagai format seperti meme, video pendek, dan kutipan teks. Proses ini memperkuat daya jangkau dan keberlanjutan pesan. Menurut Jenkins (2006), konvergensi media memungkinkan terjadinya aliran konten lintas platform yang memperkaya pengalaman audiens. Hal ini semakin memperkuat posisi stand up comedy dalam ekosistem komunikasi digital.

Namun demikian, transformasi ini juga membawa tantangan, terutama terkait dengan kualitas diskursus dan potensi polarisasi. Dalam lingkungan digital yang didorong oleh algoritma, konten yang bersifat provokatif atau emosional cenderung lebih mudah viral. Hal ini dapat mempengaruhi cara pesan politik diterima dan dipahami oleh audiens. Oleh karena itu, penting untuk melihat ultra komunika tidak hanya sebagai peluang, tetapi juga sebagai fenomena yang perlu dikaji secara kritis. Dengan demikian, transformasi komunikasi politik harus diimbangi dengan literasi digital yang memadai.

Secara keseluruhan, ultra komunika dalam stand up comedy merupakan bentuk transformasi komunikasi politik yang signifikan dalam era cyber democracy. Ia mengintegrasikan hiburan dan politik dalam satu ruang komunikasi yang efektif, partisipatif, dan dinamis. Komika berperan sebagai agen komunikasi yang mampu menjembatani isu-isu kompleks dengan cara yang komunikatif dan kreatif. Dengan dukungan teknologi digital, pesan yang disampaikan dapat menjangkau audiens yang luas dan beragam. Oleh karena itu, ultra komunika menjadi fenomena penting dalam memahami perkembangan komunikasi politik kontemporer.

Hegemoni dan Resistensi dalam Humor Politik

Konsep hegemoni dalam humor politik menjadi kunci untuk memahami bagaimana stand up comedy beroperasi dalam ruang komunikasi digital. Dalam perspektif Antonio Gramsci, hegemoni tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui persetujuan (consent) yang dibangun secara kultural. Humor menjadi salah satu medium efektif untuk membangun konsensus tersebut karena sifatnya yang ringan dan mudah diterima. Dalam konteks ini, stand up comedy tidak sekadar menyampaikan kritik, tetapi juga dapat memperkuat nilai-nilai dominan yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, humor politik berada dalam posisi ambivalen antara reproduksi dan resistensi ideologi.

Dalam praktiknya, komika yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan cenderung mereproduksi narasi dominan melalui materi mereka. Narasi ini sering kali dikemas dalam bentuk humor yang tampak netral, tetapi secara implisit mendukung legitimasi kekuasaan. Dalam kerangka ini, humor berfungsi sebagai alat normalisasi yang membuat kebijakan atau praktik tertentu tampak wajar. Sejalan dengan pandangan Louis Althusser, humor dapat dilihat sebagai bagian dari aparatus ideologis yang bekerja secara halus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dominasi tidak selalu terlihat sebagai paksaan, tetapi sebagai sesuatu yang diterima secara sukarela oleh audiens.

Sebaliknya, komika yang mengambil posisi kritis memainkan peran sebagai kekuatan kontra-hegemonik. Mereka menggunakan humor untuk membongkar narasi dominan dan mengungkap ketimpangan sosial maupun politik. Dalam perspektif Michel Foucault, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap relasi kuasa yang tersebar dalam berbagai aspek kehidupan. Humor menjadi alat untuk mendestabilisasi kebenaran yang dianggap mapan. Dengan cara ini, stand up comedy berfungsi sebagai ruang alternatif bagi munculnya wacana tandingan.

Fenomena ini dapat diamati dalam praktik komika seperti Bintang Emon yang kerap mengkritik isu hukum melalui satire. Materinya tidak hanya menghibur, tetapi juga

mengandung pesan politik yang kuat. Demikian pula Pandji Pragiwaksono yang sering menggunakan platform digital untuk menyampaikan opini kritis terhadap kebijakan publik. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana humor dapat menjadi sarana artikulasi resistensi dalam ruang publik. Dengan demikian, komika tidak hanya berperan sebagai entertainer, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial.

Namun, dalam era digital, proses hegemonik tidak lagi bersifat satu arah. Kehadiran media sosial memungkinkan audiens untuk berpartisipasi aktif dalam produksi dan distribusi wacana. Menurut Jenkins (2006), budaya partisipatif memungkinkan pengguna menjadi co-creator dalam ekosistem media. Audiens tidak hanya menerima humor, tetapi juga menafsirkannya, memodifikasinya, dan menyebarkannya kembali. Hal ini menciptakan dinamika baru di mana kekuasaan atas makna menjadi lebih terdistribusi.

Meskipun demikian, distribusi kekuasaan ini tidak sepenuhnya egaliter. Algoritma media sosial memainkan peran penting dalam menentukan visibilitas konten. Gillespie (2018) menekankan bahwa algoritma memiliki implikasi politik karena dapat memperkuat narasi tertentu sekaligus mengabaikan yang lain. Dalam konteks humor politik, konten yang sesuai dengan preferensi mayoritas atau kepentingan tertentu cenderung lebih mudah viral. Akibatnya, proses hegemonik tetap berlangsung, meskipun dalam bentuk yang lebih tersembunyi.

Selain itu, partisipasi audiens juga dapat memperkuat hegemoni melalui mekanisme reproduksi wacana. Ketika audiens membagikan konten tanpa refleksi kritis, mereka secara tidak langsung ikut menyebarkan ideologi yang terkandung di dalamnya. Dalam kerangka Stuart Hall, proses encoding dan decoding tidak selalu menghasilkan interpretasi yang beragam, karena sering kali dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak selalu identik dengan resistensi.

Di sisi lain, ruang digital juga membuka peluang bagi munculnya resistensi kolektif.

Submitted: May 2026, **Accepted:** July 2026, **Published:** August 2026

Audiens dapat menggunakan humor sebagai alat kritik terhadap kekuasaan, misalnya melalui meme atau komentar satir. Shirky (2008) menyebut fenomena ini sebagai kekuatan aksi kolektif yang difasilitasi oleh teknologi digital. Dalam konteks ini, humor menjadi bahasa bersama yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan ketidakpuasan secara kreatif. Dengan demikian, resistensi tidak hanya datang dari komika, tetapi juga dari audiens.

Kompleksitas ini menunjukkan bahwa hegemoni dan resistensi dalam humor politik tidak dapat dipisahkan secara tegas. Keduanya saling berinteraksi dalam proses yang dinamis dan terus berubah. Stand up comedy menjadi arena di mana berbagai kepentingan ideologis bertemu dan bernegosiasi. Humor berfungsi sebagai medium yang fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan berbagai konteks sosial dan politik. Oleh karena itu, analisis terhadap humor politik perlu mempertimbangkan relasi kuasa yang melingkupinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa humor politik dalam stand up comedy merupakan praktik komunikasi yang sarat dengan dinamika hegemoni dan resistensi. Dalam era cyber democracy, proses ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan partisipasi audiens dan intervensi teknologi. Hegemoni tidak lagi bersifat tunggal, melainkan tersebar dalam jaringan komunikasi digital. Namun, resistensi tetap memiliki ruang untuk berkembang melalui kreativitas dan partisipasi publik. Hal ini menegaskan bahwa humor bukan sekadar hiburan, tetapi juga medan pertarungan ideologi dalam masyarakat modern.

Simulasi, Hiperrealitas, dan Viralitas Humor

Simulasi, hiperrealitas, dan viralitas menjadi tiga konsep kunci untuk memahami transformasi humor politik dalam era digital. Dalam perspektif Jean Baudrillard, masyarakat kontemporer tidak lagi hidup dalam realitas objektif, melainkan dalam dunia simulasi yang diproduksi melalui media. Humor politik dalam stand up comedy menjadi bagian dari proses ini, di mana realitas politik direpresentasikan ulang dalam bentuk narasi komedik yang sering kali

lebih menarik daripada fakta itu sendiri (Baudrillard, 1983). Dengan demikian, humor tidak sekadar mencerminkan realitas, tetapi menciptakan versi realitas yang baru.

Fenomena ini semakin diperkuat oleh logika media digital yang mengutamakan perhatian (attention economy). Seperti dijelaskan oleh Davenport dan Beck (2001), informasi yang mampu menarik perhatian akan lebih mudah tersebar, terlepas dari akurasi atau kedalaman substansinya. Dalam konteks ini, humor politik memiliki keunggulan karena sifatnya yang ringan, emosional, dan mudah dikonsumsi. Stand up comedy kemudian menjadi medium strategis dalam memproduksi simulasi politik yang cepat viral.

Dalam kerangka hiperrealitas, batas antara fakta dan representasi menjadi kabur. Humor yang disampaikan komika sering kali mengandung distorsi, simplifikasi, atau bahkan hiperbola terhadap isu politik tertentu. Namun, justru karena sifatnya yang menghibur, pesan tersebut lebih mudah diterima oleh audiens. Hal ini sejalan dengan pandangan Kellner (2003) yang menyatakan bahwa media budaya populer memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat.

Viralitas menjadi mekanisme utama dalam memperkuat hiperrealitas tersebut. Algoritma media sosial seperti yang dijelaskan oleh Gillespie (2018) bekerja dengan memprioritaskan konten yang memiliki engagement tinggi, seperti like, share, dan komentar. Humor politik yang mengandung unsur kontroversi atau sindiran tajam cenderung menghasilkan interaksi tinggi, sehingga lebih sering muncul dalam feed pengguna. Akibatnya, narasi humor tertentu dapat mendominasi ruang publik digital.

Lebih jauh, viralitas menciptakan efek amplifikasi terhadap pesan humor. Konten stand up comedy tidak lagi berhenti pada panggung pertunjukan, tetapi direproduksi dalam berbagai bentuk seperti meme, video pendek, dan potongan klip yang disebarluaskan secara masif. Menurut Jenkins (2006), fenomena ini merupakan bagian dari budaya partisipatif, di mana audiens turut berperan dalam menyebarkan dan memodifikasi konten. Dalam konteks ini, humor politik mengalami transformasi menjadi produk kolektif.

Namun demikian, proses reproduksi ini sering kali menghilangkan konteks asli dari materi humor. Potongan video atau meme yang viral dapat mengubah makna pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh komika. Hal ini menciptakan realitas semu yang tidak selalu sesuai dengan niat awal komunikator. Dalam istilah Baudrillard, simulasi ini akhirnya menggantikan realitas itu sendiri, sehingga publik lebih mempercayai representasi daripada fakta.

Selain itu, hiperrealitas humor politik juga berkaitan dengan fenomena disinformasi. Walther (2017) menjelaskan bahwa dalam komunikasi digital, pesan yang emosional dan menarik cenderung lebih dipercaya dibandingkan informasi yang berbasis data. Humor politik sering kali memanfaatkan stereotip, ironi, dan simplifikasi yang dapat memperkuat bias kognitif audiens. Akibatnya, persepsi publik terhadap isu politik dapat terbentuk tanpa melalui proses verifikasi yang memadai.

Dalam konteks demokrasi digital, kondisi ini memiliki implikasi yang signifikan. Dahlgren (2013) menekankan bahwa ruang publik digital seharusnya menjadi arena deliberasi rasional. Namun, dominasi konten viral berbasis humor justru dapat menggeser diskursus dari rasionalitas menuju emosionalitas. Hal ini menunjukkan adanya paradoks dalam cyber democracy, di mana partisipasi meningkat, tetapi kualitas diskursus tidak selalu membaik.

Di sisi lain, hiperrealitas juga membuka peluang bagi resistensi politik. Humor dapat digunakan untuk mendekonstruksi narasi dominan dan menghadirkan perspektif alternatif. Komika yang kritis mampu memanfaatkan viralitas untuk menyebarkan kritik terhadap kekuasaan secara luas. Dengan demikian, simulasi tidak selalu bersifat manipulatif, tetapi juga dapat menjadi alat emansipasi (Fuchs, 2014).

Secara keseluruhan, simulasi, hiperrealitas, dan viralitas menunjukkan bahwa humor politik dalam stand up comedy memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk realitas sosial. Humor tidak lagi sekadar hiburan, melainkan menjadi instrumen komunikasi politik yang strategis dalam era

digital. Oleh karena itu, memahami dinamika ini menjadi penting untuk melihat bagaimana ultra komunika bekerja dalam membentuk opini publik di tengah arus informasi yang semakin kompleks.

Budaya Partisipatif dan Produksi Makna Kolektif

Budaya partisipatif merupakan salah satu fondasi utama dalam memahami dinamika ultra komunika di era digital. Konsep ini, sebagaimana dikemukakan oleh Henry Jenkins, menekankan bahwa audiens tidak lagi bersifat pasif, melainkan aktif terlibat dalam proses produksi, distribusi, dan interpretasi konten (Jenkins, 2006). Dalam konteks stand up comedy, audiens tidak hanya menikmati materi humor, tetapi juga berkontribusi dalam memperluas makna melalui berbagai bentuk interaksi digital.

Partisipasi audiens dalam ruang digital ditandai dengan aktivitas seperti membuat meme, membagikan potongan video, hingga memberikan komentar yang menambahkan interpretasi baru terhadap materi komika. Aktivitas ini menunjukkan bahwa produksi makna tidak lagi dimonopoli oleh kreator, melainkan menjadi proses kolektif yang melibatkan banyak aktor. Menurut Bruns (2008), fenomena ini disebut sebagai “produsage,” yaitu gabungan antara produksi dan penggunaan dalam ekosistem digital.

Dalam ekosistem ultra komunika, stand up comedy menjadi salah satu sumber utama produksi simbolik yang kemudian direproduksi secara masif oleh audiens. Humor yang awalnya disampaikan dalam format pertunjukan langsung dapat dengan cepat berubah menjadi konten digital yang tersebar luas. Transformasi ini memperlihatkan bagaimana pesan komunikasi menjadi lebih cair dan terbuka terhadap reinterpretasi. Setiap reproduksi konten berpotensi menghasilkan makna baru yang berbeda dari konteks aslinya.

Budaya partisipatif juga memperkuat karakter horizontal dalam komunikasi digital. Tidak ada lagi batas tegas antara komunikator dan komunikan, karena keduanya dapat saling bertukar peran. Hal ini sejalan dengan pemikiran Castells (2012) tentang network society, di mana kekuasaan komunikasi

tersebar dalam jaringan yang terdesentralisasi. Dalam konteks ini, audiens memiliki kekuatan untuk menentukan konten mana yang menjadi viral dan mana yang tidak.

Namun demikian, produksi makna kolektif tidak selalu berjalan secara ideal. Proses reproduksi yang cepat sering kali menyebabkan terjadinya penyederhanaan isu yang kompleks. Humor politik yang awalnya memiliki konteks tertentu dapat direduksi menjadi sekadar punchline atau meme yang kehilangan kedalaman analisis. Menurut Sunstein (2017), kondisi ini berpotensi melemahkan kualitas diskursus publik dalam demokrasi digital.

Selain itu, budaya partisipatif juga membuka ruang bagi penyebaran misinformasi. Ketika konten humor direproduksi tanpa verifikasi, kemungkinan terjadinya distorsi makna menjadi semakin besar. Audiens yang tidak memiliki literasi media yang memadai dapat dengan mudah menerima informasi yang tidak akurat sebagai kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas informasi.

Di sisi lain, produksi makna kolektif juga memiliki potensi emansipatoris. Audiens dapat menggunakan humor sebagai alat untuk mengekspresikan kritik, resistensi, dan solidaritas sosial. Dalam banyak kasus, meme politik menjadi medium alternatif untuk menyuarakan aspirasi yang tidak terakomodasi dalam media arus utama. Fuchs (2014) menyebut fenomena ini sebagai bentuk komunikasi digital yang bersifat kritis dan partisipatif.

Lebih jauh, dinamika ini menciptakan apa yang disebut sebagai “cultural remix.” Audiens tidak hanya mereproduksi konten, tetapi juga menggabungkan berbagai elemen budaya untuk menciptakan makna baru. Humor stand up dapat dikombinasikan dengan referensi populer, isu terkini, dan simbol budaya lainnya. Proses ini memperkaya wacana, tetapi juga membuatnya semakin kompleks dan sulit dikontrol.

Dalam perspektif ultra komunika, budaya partisipatif mempercepat sirkulasi simbol dan memperluas jangkauan komunikasi secara eksponensial. Viralitas menjadi hasil dari

interaksi kolektif yang terus menerus antara kreator dan audiens. Setiap interaksi berkontribusi dalam membentuk lanskap komunikasi yang dinamis dan tidak stabil. Dengan demikian, makna tidak pernah bersifat final, melainkan selalu berada dalam proses negosiasi.

Secara keseluruhan, budaya partisipatif dan produksi makna kolektif menunjukkan bahwa komunikasi digital telah mengalami transformasi fundamental. Stand up comedy tidak lagi hanya menjadi bentuk hiburan, tetapi juga menjadi arena produksi makna yang kompleks dan kolaboratif. Oleh karena itu, memahami peran audiens sebagai co-creator menjadi kunci dalam menganalisis fenomena ultra komunika di era cyber democracy.

Analisis Wacana Kritis: Humor sebagai Arena Ideologi

Pendekatan analisis wacana kritis memberikan kerangka yang kuat untuk memahami humor sebagai arena ideologi dalam stand up comedy. Dalam perspektif Teun A. van Dijk, wacana tidak pernah netral, melainkan selalu terkait dengan relasi kekuasaan dan produksi ideologi dalam masyarakat (van Dijk, 1998). Humor, meskipun tampak ringan dan menghibur, sesungguhnya mengandung struktur makna yang merefleksikan posisi sosial, kepentingan politik, dan orientasi ideologis tertentu.

Dalam praktik stand up comedy, pilihan bahasa menjadi elemen penting dalam membangun wacana ideologis. Komika sering menggunakan diksi yang kontekstual, metafora, serta permainan kata untuk menyampaikan kritik sosial dan politik. Bahasa yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen framing yang mempengaruhi cara audiens memahami suatu isu. Fairclough (1995) menegaskan bahwa bahasa dalam wacana publik berperan dalam membentuk realitas sosial, bukan sekadar merepresentasikannya.

Selain bahasa, narasi humor juga mengandung struktur ideologis yang kompleks. Setiap joke memiliki premis, punchline, dan konteks sosial yang membentuk makna tertentu. Dalam banyak kasus, narasi humor digunakan untuk memperkuat stereotip,

mengkritik kebijakan, atau bahkan mendeligitimasi aktor politik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa humor dapat menjadi alat reproduksi ideologi dominan sekaligus sarana untuk menantanginya.

Lebih jauh, analisis wacana kritis melihat bahwa humor bekerja melalui mekanisme implisit. Pesan ideologis dalam humor sering kali tidak disampaikan secara langsung, melainkan melalui ironi, satire, dan ambiguitas. Strategi ini membuat pesan lebih mudah diterima karena tidak terasa menggurui atau konfrontatif. Menurut Billig (2005), humor memiliki kekuatan retorik yang mampu menyampaikan kritik secara halus namun efektif.

Dalam konteks ini, stand up comedy dapat dipahami sebagai arena pertarungan wacana. Berbagai ideologi—baik yang pro-kekuasaan maupun yang oposisi—berinteraksi dan berkompetisi dalam ruang humor. Komika dengan latar belakang sosial dan politik yang berbeda akan membawa perspektif yang berbeda pula dalam materi mereka. Akibatnya, panggung stand up menjadi ruang dialektika ideologis yang dinamis.

Namun demikian, tidak semua humor bersifat kritis atau subversif. Dalam beberapa kasus, humor justru berfungsi untuk menormalisasi atau melegitimasi struktur kekuasaan yang ada. Joke yang tampak lucu bisa saja memperkuat bias sosial, diskriminasi, atau bahkan propaganda politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Gramsci (1971) tentang hegemoni, di mana ideologi dominan dipertahankan melalui konsensus budaya, termasuk melalui humor.

Analisis wacana kritis juga menyoroti peran konteks dalam memahami makna humor. Joke yang sama dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada situasi sosial, audiens, dan medium distribusinya. Dalam era digital, konteks ini menjadi semakin kompleks karena konten humor dapat tersebar lintas platform dan audiens. Akibatnya, makna humor menjadi lebih cair dan terbuka terhadap berbagai interpretasi.

Selain itu, interaksi audiens dalam ruang digital turut mempengaruhi konstruksi wacana humor. Komentar, reinterpretasi, dan

reproduksi konten oleh audiens dapat memperkuat atau bahkan mengubah makna awal dari sebuah joke. Dalam perspektif van Dijk, proses ini menunjukkan bahwa ideologi tidak hanya diproduksi oleh elite, tetapi juga oleh praktik komunikasi sehari-hari masyarakat.

Pendekatan ini juga mengungkap bahwa humor memiliki dimensi kognitif yang penting. Audiens tidak hanya tertawa, tetapi juga memproses informasi dan membentuk opini berdasarkan pesan yang diterima. Oleh karena itu, humor politik memiliki potensi besar dalam mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu sosial dan politik. Ini menjadikan humor sebagai alat komunikasi yang strategis dalam era cyber democracy.

Secara keseluruhan, analisis wacana kritis menunjukkan bahwa stand up comedy bukan sekadar hiburan, melainkan arena produksi dan reproduksi ideologi. Humor menjadi medium yang efektif untuk menyampaikan, menegosiasikan, dan bahkan menantang wacana dominan. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan yang kritis terhadap humor politik agar makna-makna tersembunyi di baliknya dapat diungkap secara komprehensif.

SIMPULAN

Fenomena ultra komunika dalam stand up comedy di era cyber democracy menunjukkan bahwa praktik komunikasi telah mengalami transformasi mendasar dari model linear menuju model yang bersifat jaringan, partisipatif, dan hiper-digital. Stand up comedy tidak lagi sekadar bentuk hiburan, melainkan telah menjadi medium komunikasi politik yang efektif dalam menyampaikan, membingkai, dan mendistribusikan pesan kepada publik. Melalui platform digital, pesan humor dapat melampaui batas ruang dan waktu, serta menjangkau audiens yang lebih luas dengan kecepatan yang tinggi.

Ultra komunika ditandai oleh intensitas reproduksi pesan melalui mekanisme viralitas, algoritma, dan partisipasi audiens. Dalam konteks ini, audiens tidak lagi berperan sebagai konsumen pasif, tetapi sebagai co-creator yang turut membentuk, memodifikasi, dan menyebarkan makna. Budaya partisipatif

memperkuat dinamika komunikasi horizontal, namun sekaligus menghadirkan tantangan berupa fragmentasi opini, echo chamber, dan potensi polarisasi dalam ruang publik digital.

Dari perspektif ideologi, humor politik dalam stand up comedy terbukti tidak netral. Ia mengandung struktur wacana yang merefleksikan relasi kekuasaan, baik dalam bentuk reproduksi hegemoni maupun resistensi terhadapnya. Komika berperan sebagai aktor komunikasi yang dapat memposisikan diri sebagai agen dominasi atau counter-hegemonic force. Dengan demikian, panggung stand up comedy menjadi arena pertarungan ideologi yang kompleks dan dinamis.

Lebih lanjut, dalam perspektif simulasi dan hiperrealitas ala Jean Baudrillard, humor politik tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga menciptakan realitas baru yang sering kali lebih berpengaruh daripada fakta objektif. Viralitas mempercepat proses ini dengan mendorong reproduksi simbolik yang masif, sehingga persepsi publik dapat terbentuk melalui narasi humor yang belum tentu berbasis data yang akurat.

Dengan demikian, ultra komunika dalam stand up comedy merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan aspek teknologi, budaya, ideologi, dan kekuasaan. Ia menghadirkan peluang besar dalam memperluas partisipasi politik dan menyederhanakan isu kompleks, namun juga menyimpan risiko dalam bentuk disinformasi, simplifikasi, dan polarisasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman kritis terhadap dinamika ini agar komunikasi politik digital dapat berkontribusi secara konstruktif bagi demokrasi.

REKOMENDASI

Pertama, diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat agar audiens tidak hanya aktif secara partisipatif, tetapi juga kritis dalam mengonsumsi dan mendistribusikan konten humor politik. Literasi ini mencakup kemampuan untuk memahami konteks, memverifikasi informasi, serta mengenali bias ideologis dalam pesan yang disampaikan. Dengan demikian, partisipasi digital dapat

menghasilkan diskursus publik yang lebih sehat dan rasional.

Kedua, para komika sebagai aktor komunikasi publik diharapkan memiliki kesadaran etis dalam memproduksi konten humor politik. Meskipun humor memiliki kebebasan ekspresi, tanggung jawab sosial tetap diperlukan agar tidak memperkuat misinformasi, stereotip, atau polarisasi yang merugikan masyarakat. Stand up comedy dapat tetap kritis tanpa kehilangan integritas dan akurasi.

Ketiga, platform media sosial perlu mengembangkan kebijakan algoritmik yang lebih transparan dan akuntabel. Algoritma yang hanya mengutamakan engagement berpotensi memperkuat konten yang sensasional namun tidak informatif. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara popularitas konten dan kualitas informasi dalam distribusi pesan digital.

Keempat, akademisi dan peneliti di bidang komunikasi perlu terus mengembangkan kajian tentang ultra komunika, khususnya dalam konteks lokal seperti Indonesia. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan teori komunikasi, budaya digital, dan politik menjadi penting untuk memahami kompleksitas fenomena ini secara komprehensif.

Kelima, pemerintah dan lembaga terkait perlu memfasilitasi ruang publik digital yang inklusif dan deliberatif. Regulasi yang tepat diperlukan untuk mencegah penyebaran disinformasi tanpa membatasi kebebasan berekspresi. Dalam hal ini, kolaborasi antara negara, platform digital, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi digital.

Secara keseluruhan, ultra komunika dalam stand up comedy harus dipandang sebagai fenomena yang tidak hanya mencerminkan perubahan komunikasi, tetapi juga perubahan struktur demokrasi itu sendiri. Dengan pengelolaan yang tepat, humor politik dapat menjadi instrumen edukatif dan emansipatoris dalam memperkuat kehidupan demokrasi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. P., & Wulandari, L. (2024). Satire media sosial: Medium baru pembentukan persepsi politik generasi Z. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1).
<https://doi.org/10.15575/jispo.v15i1.43980>
- Ashari, A., & Mahadian, A. B. (2020). Kritik comic dalam kompetisi kritik DPR 2018 sebagai praktik demokrasi. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 139–154.
<https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol14.iss2.art3>
- Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and simulation*. University of Michigan Press.
- Billig, M. (2005). *Laughter and ridicule: Towards a social critique of humour*. Sage.
- Bergson, H. (1911). *Laughter: An essay on the meaning of the comic*. Macmillan.
- Bruns, A. (2008). *Blogs, Wikipedia, Second Life, and beyond: From production to produsage*. Peter Lang.
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity Press.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Dahlgren, P. (2005). *The internet, public spheres, and political communication*. Routledge.
- Dahlgren, P. (2009). *Media and political engagement*. Cambridge University Press.
- Dahlgren, P. (2013). *The political web: Media, participation and alternative democracy*. Palgrave Macmillan.
- Davis, J. L., Love, T. P., & Killen, G. (2018). Seriously funny: The political work of humor on social media. *New Media & Society*, 20(10), 3898–3916.
<https://doi.org/10.1177/1461444818762602>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. Sage.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis*. Longman.
- Fuchs, C. (2014). *Social media: A critical introduction*. Sage.
- Fuchs, C. (2017). *Social media: A critical introduction* (2nd ed.). Sage.
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere*. MIT Press.
- Heiss, R., & Matthes, J. (2021). Funny cats and politics: Do humorous context posts impede or foster the elaboration of news posts on social media? *Communication Research*.
<https://doi.org/10.1177/0093650219826006>
- Ibrahim, I., Absri, A., & Rahmadani, W. (2025). Strategi linguistik dalam kritik politik: Analisis wacana kritis bahasa kiasan pada stand-up comedy Indonesia. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(3), 851–870.
<https://doi.org/10.30872/diglosia.v8i3.1438>
- Indra, D., Hasrul, H., Suryanef, S., & Rafni, A. (2024). Analisis isi pesan politik berbentuk humor melalui media TikTok jelang pemilihan umum. *Journal of Education, Cultural and Politics (JECCO)*, 4(2), 454–466.
<https://doi.org/10.24036/jecco.v4i2.471>
- Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. NYU Press.

- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*.
- Maronikolakis, A., Sanchez Villegas, D., Preotiuc-Pietro, D., & Aletras, N. (2020). Analyzing political parody in social media. *arXiv preprint*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.13878>
- McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. McGraw-Hill.
- Meyer, J. (2000). Humor as a double-edged sword: Four functions of humor in communication. *Communication Theory*.
- Saxena, K., & Ofori-Parku, S. S. (2024). 'Funny' politics: Stand-up political comedy, public engagement, critical thinking, and opinion sharing in India. *Media Asia*, 19(3). <https://doi.org/10.1177/09732586241252201>
- Sihombing, L. H. (2022). Satirical humor as critics of government through Eastern Indonesian stand-up comedian. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 15(2), 243–254.
- Street, J. (2004). Celebrity politicians: Popular culture and political representation. *The British Journal of Politics and International Relations*.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Van Dijk, J. (2013). *The culture of connectivity: A critical history of social media*. Oxford University Press.
- Van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A multidisciplinary approach*. Sage.
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- Yang, X., Chen, B.-C., Maity, M., & Ferrara, E. (2016). Social politics: Agenda setting and political communication on social media. In *International Conference on Social Informatics* (pp. 330–344). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47880-7_20